BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara yuridis, Undang-Undang Perlindungan Guru telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Hal ini terlihat jelas pada pasal 39 yang menyebutkan bahwa Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Adapun maksud Perlindungan Profesi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya. Sementara perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kesehatan, dan/atau resiko lainnya.

Berangkat dari paparan di atas, terlihat bahwa eksistensi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 telah memuat perlindungan terhadap guru atas profesinya. Namun, implementasi terhadap Undang-Undang tersebut masih belum terlaksana. Undang-Undang tersebut lebih banyak disoroti sebagai kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru, sementara perlindungan terhadap profesi guru seringkali lepas dari perhatian.

Kita tidak menutup mata terhadap tindakan oknum guru yang kurang mendidik dengan memberikan hukuman di luar nilai pendidikan. Mereka meletakkan peserta didiknya sebagai penjahat yang harus dihabisi, bukan sosok yang perlu dibimbing dan diperbaiki. Demikian pula sikap orang tua/masyarakat yang mulai mengalami pergeseran dalam memandang profesi guru. Mereka terlalu banyak menuntut guru agar dapat mengahntarkan peserta didik sebagai masyarakat terdidik, namun tidak seiring dengan penghargaan dan perlindungan yang diberikan.

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

Sebagai tenaga pendidik, guru seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakuan masyarakat. Guru dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun tatkala guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, guru dihadang oleh UU Perlindungan Anak dan KPAI. Jika guru gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal menghantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan, kembali pendidik akan menjadi kambing hitam dan tumbal atas kegagalan tersebut.

Tatkala guru ingin melakukan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka secara sepihak orang tua dan masyarakat mengkategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan UU Perlindungan Anak. Mereka kemudian melaporkan tindakan guru tersebut kepada polisi atau kepada KPAID. Dengan kekuatan tersebut, acapkali guru tidak mendapatkan perlindungan terhadap profesinya. Akibat adanya KPAID dan UU Perlindungan Anak, eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah.

Paradigma Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sesuai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 menyebutkan bahwa :

- 1) Pendidikan Membentuk Karakter: Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.
- 2) Sekolah yang Menyenangkan: Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.
- 3) Pendidikan Membangun Kebudayaan : Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 dikemukakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Mantan Menteri Pendidikan Nasional yang juga penggagas Gerakan Indonesia Mengajar Anies Baswedan dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa kekayaan terbesar bangsa kita adalah manusianya. Ketika manusia Indonesia tercerdaskan dengan baik maka segala macam potensi alam yang dimiliki negeri ini bisa dikonversi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berkaca dari pernyataan itu kita mestinya menyadari bahwa guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia. Di pundak para gurulah bangsa ini menitipkan beban agar bisa mendidik kader-kader bangsa menjadi manusia Indonesia dengan daya saing global di masa depan. Tentu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi para guru jika berhasil mewujudkan misi mulia tersebut.

Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara mempunyai visi "Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan yang Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal"

Misi:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Religius, Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
2. Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan
3. Mewujudkan Pembangunan Pendidikan Berkualitas, Kepemudaan, Budaya dan Masyarakat Hukum Adat
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur dan Iklim Investasi
5. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pariwisata dan Rumah Sehat

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

6. Mewujudkan Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Regional dan Penciptaan kondisi Keamanan yang Kondusif.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka Program Prioritas Kabupaten Luwu Utara adalah:

1. Program Pengembangan Sistem e-Budgeting bagi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana regulasi yang telah disyaratkan
2. Membangun pusat pengaduan, Pelayanan dan Penyelamatan secara Cepat dan Terpadu (CARESTER= Care and Rescue Center)
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan pola penjaringan tenaga kerja terdidik di setiap desa dengan program sarjana membangun desa
4. Program Peningkatan Mutu Tenaga kependidikan serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa Luwu Utara yang berprestasi
5. Program Pembangunan Infrastruktur monumental kota dan Perdesaan dalam mendukung keberadaan investor berupa Kawasan Kota BERKILAU (Bersih, Ramah, Rukun, Indah dan Aman untuk Semua) dengan penuntasan pembangunan jalan Lingkar Utara dan Selatan Kota Masamba, Pembangunan jalan-jalan dalam kota penghubung jalan Lingkar Utara dan Selatan, pembuatan median jalur 2 untuk jalan utama dalam kota, penataan taman dan RTH, pembangunan Islamic Center/Mesjid Agung dan pembangunan infrastruktur layanan lainnya yang berarsitektur modern, Pembangunan Kawasan Industri Luwu Utara (KILU), Sentra ekonomi, Pelabuhan, Bandara Udara, Jalan-Jalan Ekonomi (JALAN LINGKAR EKONOMI) dan Jaringan Irigasi
6. Program Peningkatan Nilai Tambah Agribisnis dengan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam Upaya Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan.
7. Program Pengembangan Perumahan untuk PNS, Masyarakat Pesisir dan Kurang Mampu
8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan pembentukan PERUSDA (Agribisnis dan Kelistrikan), PSO (Public Service

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

- Obligation) sebagai lembaga pengendali harga, operasi pasar dan pasar murah
9. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial melalui Bantuan Modal (1% dari APBD)
 10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Terdidik (TOT, pembukaan lapangan kerja baru, penempatan tenaga kerja terdidik di perusahaan dan misi TKI profesional)
 11. Program Pemeliharaan Kantrantibmas (Keamanan Desa Mandiri), Pencegahan Tindak Kriminal dengan Memperbanyak Kegiatan Interaksi Sosial Keagamaan dan Pemuda

Secara umum arah pembangunan Kabupaten Luwu Utara bisa dilihat pada visi misi di atas, dan paling tidak ada 2 (dua) program utama yang berhubungan dengan pendidikan. Pertama, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan pola penjaringan tenaga kerja terdidik di setiap desa dengan program sarjana membangun desa dan kedua Program Peningkatan Mutu Tenaga kependidikan serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi

Dalam melaksanakan tugasnya, guru yang seharusnya aman dan nyaman menjalankan proses belajar mengajar menghadapi berbagai masalah. Masalah itu sifatnya internal guru, eksternal guru dan kebijakan. Permasalahan internal yang dihadapi guru di Indonesia, yaitu: masalah kualitas/mutu guru. Permasalahan eksternal guru adalah permasalahan hukum pidana yang melibatkan anak didik dan wali anak didik. Permasalahan kebijakan Pemerintah Daerah yaitu jumlah guru yang dirasakan masih kurang, masalah distribusi guru, dan masalah kesejahteraan guru.

Permasalahan internal guru terkait kualitas atau mutu antara lain : (i) belum diterapkannya sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa; (ii) belum dilaksanakannya penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; (iii) belum dipertimbangkannya perbaikan disain program dan keselarasan disiplin ilmu sebagai dasar peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru; serta (iv) belum dilaksanakannya Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

guru. Namun kondisi ini telah menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Pusat dengan munculnya kebijakan peningkatan Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru, hal ini bisa membuat Pemerintah Daerah bernafas lega.

Permasalahan eksternal guru yang berujung dengan penahanan guru karena divonis pidana akhir-akhir sangat marak di Indonesia. Jika dulu guru diperbolehkan untuk memukul tangan atau mencubit siswa karena siswa yang kurang memahami mata pelajaran atau melakukan pelanggaran norma etika, namun sekarang hanya dengan kata-kata saja bisa menjadi perkara hukum karena termasuk kekerasan psikologis,"

Masih terngiang ditelinga kita, meninggalnya seorang guru bernama Tatang Wiguna, seorang guru SMP di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu, menurutnya ini adalah kejadian yang tak dapat ditolerir. Tatang diketahui tewas dikeroyok sejumlah orang di jalan AH Nasution Bandung, Senin 22/8-2016 dengan luka tusukan benda tajam ditubuhnya oleh orang yang tak dikenal. Korban sempat dilarikan ke RS Santo Yusuf untuk diberikan pertolongan namun jiwanya tak dapat diselamatkan. Seorang guru yang niatnya luar biasa mendidik murid, malah mengalami penusukan dari pelaku yang tak bertanggung jawab. Tanpa ada guru tak mungkin negara mengalami kemajuan seperti ini.

Peristiwa lain dibulan Februari, guru SMP Raden Rakhmat Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur hanya karena mencubit anak asuhnya yang tidak mau melaksanakan sholat dhuha berakhir di meja hijau. Bulan April lalu seorang guru bernama Inho Loe guru SD Santo Antonius Matraman Jakarta Timur dilaporkan ke polisi oleh orang tua peserta didik yang tidak terima anaknya ditegur guru dengan cubitan, karena tidak memperhatikan pelajaran. Mei 2016 guru SDN 20 Sungai Radak Baru Kalimantan Barat bernama Jamila yang berstatus guru honorer, melaporkan ke polisi karena dianiaya orang tua peserta didik. Jamila melakukan pemotongan rambut peserta didik yang tidak mau masuk sekolah, akibatnya orang tua peserta didik tidak terima dan kembali melakukan memotong rambut terhadap guru Jamila.

Paling fenomenal terjadi 10 Agustus 2016, Drs. Muhamad Dasrul, guru mata pelajaran arsitektur di SMK Negeri 2 Makasar dikeroyok/dipukuli oleh orang tua peserta didik beserta anaknya, karena guru menegur peserta didik yang tidak membawa tugas dari guru dan peralatan sekolah. Sehingga sang guru harus

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

dilarikan ke RS. Sedang orang tua peserta didik bersama anaknya melabrak ke kelas tanpa lapor kepada guru piket yang sedang bertugas.

Hal itu terjadi karena peserta didik melaporkan kepada orang tuanya atas peristiwa itu dan orang tua peserta didik secara emosional langsung ke sekolah bersama anak setelah ketemu mengeroyok gurunya hingga berdarah-darah. Akibat pemukulan itu Drs. Muhamad Dasrul menjalani operasi di bagian hidung, dan orang tua yang melakukan penganiayaan itu harus berurusan dengan polisi serta berbuntut panjang dengan penegak hukum. Orang tua peserta didik harus menyelesaikan kewajibannya dengan kepolisian serta menurut KUHP dihukum penjara 1 (satu) tahun 8 bulan sedang anaknya yang dibawah umur harus dihukum 1 (satu) tahun.

Pada hari kejadian peserta didik yang berjumlah 700 orang melakukan demonstrasi ke kepolisian. Polsek Tamalate menuntut agar pemerintah dan yang berwenang menyelesaikan peristiwa pengeroyokan oleh orang tua peserta didik dengan anaknya yang telah melanggar hukum agar pengadilan menghukum orang tua peserta didik dan anaknya sesuai aturan yang berlaku. semua pihak mengecam tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh orang tua beserta anaknya itu. Apapun masalahnya kekerasan yang dilakukan orang tua peserta didik beserta anaknya itu adalah melawan hukum.

Kasus lain terjadi di Bantaeng. Terhadap Nurmayani Salam, Guru SMP Negeri 1 Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, karena mencubit siswa yang mengganggu temannya yang sedang belajar shoalat pada bulan Agustus 2015. Penahanan guru juga terjadi di Kabupaten Selayar sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tahun 2016 di SMKN 2, kemudian pada bulan Febuari tahun 2017 ini dialami oleh Bapak Muh. Arsal salah satu guru SMPN 3 Benteng Selayar yang memukul anak didik karena ribut di masjid sehingga mengganggu konsentrasi guru dan siswa yang akan melaksanakan shoalat dhuhur berjamaah. Bapak Arsal dilaporkan oleh orang tua anak, lalu diproses hukum oleh Polres Selayar sehari setelah kejadian (25/2/2016), kemudian oleh Pengadilan Negeri Selayar menvonis selama 1 bulan 28 hari terhadap Muh. Arsal.

Kasus kekerasan terhadap guru juga terjadi di Kabupaten Luwu Utara. korbannya adalah seorang guru sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

Malangke bernama Haslinda Gaffat dianiaya dengan cara ditikam menggunakan parang sebanyak tujuh kali oleh tetangga sekaligus siswanya sendiri

Atas maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada guru mendorong Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta agar segera dibuat Undang-Undang Perlindungan Guru. Keberadaan Undang-Undang itu dinilai sangat penting untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap guru agar mereka bisa fokus dalam mengajar. Sambil menunggu Undang-Undang perlindungan guru PGRI meminta agar pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah agar permasalahan penganiayaan guru dapat te3ratasi lebih cepat. Untuk itulah pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara merasah perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang perlindungan guru.

Dengan terbitnya Perda perlindungan guru dapat menciptakan rasa aman dan sekaligus meberikan jaminan keselamatan guru dalam menjalankan tugasnya mengajar dan mendidik peserta didik. Memberikan perlindungan terhadap guru bukanlah perlindungan yang absolut, tetapi memberikan batasan yang jelas dan pasti antara menciptakan keamanan dan jaminan keselamatan guru dalam mendisiplinkan siswa dan perlindungan anak sebagaimana telah dijamin olah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Guru yang melakukan pelanggaran akan dikembalikan pada kode etik yang berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Bab II mengenai asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku.

Sebenarnya telah banyak perauturan yang terkait dengan perlindungan guru dalam menjalani profesinya. Adapun aturan yang dimaksud adalah: Undang-Undang N0. 14 Tahun 2005, dalam pasal 35 menyatakan dalam: Ayat (1). Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas Ayat (2). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja Ayat (3).

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain Ayat (4). Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-an, pemberian imbalan yang tidak wajar, pdalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/ pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas Ayat (5). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan /resiko lain.

Peraturan pemerintah No.74 tahun 2008 tentang guru, telah mengatur perlindungan guru dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pasal 39 Ayat (1). Menegaskan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, serta peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis yang ditetapkan guru, dewan guru dan masyarakat luas serta satuan pendidikan dan peraturan perundangan dalam proses pembelajaran yang dibawah kewenangannya. Dalam ayat (2) menjelaskan sanksi dapat berupa teguran dan atau/peringatan baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai kaidah pendidikan, kode etik, dan peraturan perundangan. Pasal 40 menegaskan bahwa guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas berbentuk rasa aman dan jaminan keselamatan, dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan keselamatan kerja. Pasal 41 menjelaskan guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif , intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.

Selain itu sudah ada nota kesepahaman tentang perlindungan hukum profesi guru antara Kapolri dan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI pada tahu 2012 yang memuat pihak Kepolisian Negara memberikan perlindungan hukum kepada guru terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi dari pihak peserta didik, orang

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

tua, dan pihak lain. Yang tertuang dalam nota kesepahaman NO. B/3/1/2012 dan NO. 100/UM/PB/ XX/2012

Disamping itu polisi juga memberikan perlindungan terhadap pelecehan profesi guru dan tenaga kependidikan serta memberi perlindungan terhadap keamanan kerja mereka. Apakah dalam proses belajar mengajar atau bersifat personal, jika bersifat dalam proses belajar mengajar akan dilalui mediasi Selain itu juga telah ada surat keputusan dari Mahkamah Agung, bahwa upaya pendisiplinan yang dilakukan guru terhadap murid dalam konteks belajar mengajar tidak bisa dipidanakan.

Dari berbagai ketentuan yang dimuat di atas sebenarnya sudah jelas ketentuan yuridis formal mengenai perlindungan terhadap profesi guru, sehingga perlu ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait baik oleh peserta didik, orang tua dan masyarakat luas, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Namun dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut sering diabaikan

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Ranperda perlindungan bagi guru. Dengan harapan bahwa: 1) pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. 2) Pemerintah Daerah kewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. 3) Banyak Guru yang bekerja dalam ketidakpastian baik berkaitan dengan status kepegawaiannya, kesejahteraannya, pengembangan profesinya, terutama advokasi hukum ketika terkena masalah hukum. 4) Belum ada mekanisme yang jelas dan pasti dalam menyelesaikan masalah apabila terjadi kriminalisasi guru, khususnya pada Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara . 5) Upaya menghindari tindak kekerasan/konflik yang berpotensi menjadi semakin besar untuk masa yang akan datang. 6) menjamin hak anak berupa perlindungan sesuai undang-undang yang berlaku. 7) membumikan visi Kabupaten Luwu Utara yakni mewujudkan masyarakat maritim yang sejahtera berbasis pada nilai-nilai kultural dan keagamaan, dalam hal ini masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pendidikan agar tertanam nilai-nilai budaya dan keagamaan, sejalan dengan paradigma baru pendidikan yang berbasis karakter.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat kita simpulkan bahwa salah satu masalah pendidikan di Kabupaten Luwu Utara hubungannya dengan guru adalah Pemerintah Daerah bersama semua unsur pendidikan Belum Memberikan Perlindungan Guru yang Terjamin. Ada beberapa hal yang perlu dijawab Pemerintah Daerah dan seluruh pemerhati pendidikan yaitu :

1. Bagaimana Pemda menciptakan iklim pendidikan yang humanis;
2. Bagaimana Mekanisme dan tata kelola pengawasan, perlindungan, dan sanksi dalam proses pendidikan, baik untuk guru, anak didik, dan proses belajar mengajar;
3. Dampak kebijakan perlindungan guru di Kabupaten Luwu Utara.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lampiran I Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Naskah dikemukakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian atau pengkajian terhadap masalah perlindungan guru di Kabupaten Luwu Utara ;
2. Memberikan solusi atas masalah yang dihadapi dalam hal perlindungan guru;
3. Agar guru dapat bekerja profesional tanpa adanya rasa takut dikriminalisasi, dan sebaliknya sehingga penegak hukum dan masyarakat mempunyai standar atau pedoman yang sama untuk menilai apakah tindakan guru kepada peserta didik sesuai aturan atau melanggar aturan;

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

4. Memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan guru.

D. METODE

Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara dan diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

Adapun tahapan-tahapan penyusunan naskah akademik ini meliputi :

1. Identifikasi permasalahan terhadap guru di Luwu Utara
2. Inventarisasi bahan hukum yang berkait dengan perlindungan guru
3. Sistematika bahan hukum
4. Analisis bahan hukum
5. Perancangan dan penulisan

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan guru di Kabupaten Luwu Utara . Langkah berikutnya adalah melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan perlindungan guru di Kabupaten Luwu Utara . Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya pembuatan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Guru di Kabupaten Luwu Utara .

Secara garis besar proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan guru meliputi tiga tahap yaitu :

1. Tahap identifikasi

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

2. Tahap penyusunan naskah akademik

Tahap ini merupakan tahap dari kegiatan yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan penyusunan naskah akademik dan perumusan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Guru di Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan dengan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, focus group discution dengan DPRD, organisasi profesi guru, Dewan Pendidikan, Pengawasa Sekolah dan SKPD terkait. Dari Focus group discution tersebut diharapkan akan mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang diatur dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tersebut.

3. Tahap sosialisasi

Pada tahap ini, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru di Kabupaten Luwu Utara disosialisasikan dan konsultasi publik, dilakukan diskusi yang dihadiri oleh stake holder. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

1. PROFESI GURU

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 1 disebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 2 dikemukakan bahwa Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 509). Pengertian ini memberi kesan bahwa guru adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mengajar. Istilah guru sinonim dengan kata pengajar dan sering dibedakan dengan istilah pendidik. Perbedaan ini dalam pandangan Muh. Said dalam Rusn (2009: 62-63) dipengaruhi oleh kebiasaan berpikir orang Barat, khususnya orang Belanda yang membedakan kata *onderwijs* (pengajaran) dengan kata *opvoeding* (pendidikan). Pandangan ini diikuti oleh tokoh-tokoh pendidikan di dunia Timur, termasuk tokoh-tokoh pendidikan di kalangan muslim.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb.) tertentu. Istilah profesional berarti: 1) bersangkutan dengan profesi; 2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; 3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan amatir). Menurut UU tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 ayat 4, yang dimaksud profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

Guru sebagai sebuah profesi telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada bab XI pasal 39 ayat (2) Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa seorang guru profesional adalah guru yang bekerja dengan keahlian, kemahiran atau kecakapan menurut bidangnya. Dengan pekerjaannya itu, guru mendapatkan penghasilan yang dapat menjamin kehidupannya. Muhibbudin (2008) menegaskan bahwa seorang guru perlu memiliki kemampuan khusus, yaitu kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain yang bukan guru. Cooper (dalam Muhibbudin, 2008) mengatakan "A teacher is person charged with the responsibility of helping others to learn and to behave in new different ways"

Nata (1997: 61) mengemukakan istilah-istilah yang berkaitan dengan penamaan atas aktivitas mendidik dan mengajar. Ia lalu menyimpulkan bahwa keseluruhan istilah-istilah tersebut terhimpun dalam kata pendidik. Hal ini disebabkan karena keseluruhan istilah itu mengacu kepada seseorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan atau pengalaman kepada orang lain.

Selanjutnya, guru menurut Zahara Idris dan Lisma Jamal dalam Idris (2008: 49) adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam hal perkembangan jasmani dan ruhaniyah untuk mencapai tingkat kedewasaan, memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang mandiri, dan makhluk sosial.

Al-Gazali tidak membedakan kata pengajaran dan pendidikan sehingga guru dan pendidik juga tidak dibedakan (Rusn: 63). Hal ini senada dengan pandangan Abi Salih (1410: 10). Ia memandang bahwa sesungguhnya istilah tarbiyyah dan ta'lim dalam pendidikan Islam sama saja. Pendapatnya demikian karena melihat kenyataan bahwa di dalam al-Qur'an kedua kata itu digunakan untuk

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

mengungkapkan kegiatan pengajaran dan pendidikan yang meliputi semua segi perkembangan manusia. Dengan demikian, guru dan pendidik sama saja.

Seseorang yang aktif dalam dunia pendidikan harus memiliki kepribadian sebagai seorang pendidik. Tuntutan akan kepribadian sebagai pendidik kadang-kadang dirasakan lebih berat dibandingkan dengan profesi yang lain. Karena, guru merupakan seorang yang harus bisa digugu dan ditiru. Digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua muridnya. Segala ilmu pengetahuan yang datangnya dari sang guru dijadikan sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan atau diteliti lagi. Ditiru artinya ia menjadi *uswatun hasanah*, menjadi suri teladan dan panutan bagi muridnya, baik cara berpikir dan cara berbicaranya maupun berperilaku sehari-hari (Mulyasa, 2008:48). Dengan demikian, guru memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan.

Tugas Guru dan Tanggung Jawab Guru. Tugas dan tanggung jawab ini ada yang membedakan/memisahkan dan ada yang menyamakan.

Asmuni Syakir membedakan/memisahkan, ada tiga macam tugas guru yaitu:

1, Tugas Profesional

Tugas profesional guru meliputi mendidik, mengajar dan melatih/ membimbing, serta meneliti (riset). Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melatih/Membimbing berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan peserta didik. Dan meneliti untuk pengembangan kependidikan.

2. Tugas Sosial

Misi yang diemban guru adalah misi kemanusiaan, yaitu “pemanusiaan manusia” dalam artian transformasi diri dan auto-identifikasi peserta didik sebagai manusia dewasa yang utuh. Karenanya di sekolah, guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai “orang tua kedua” bagi peserta didik, dan di masyarakat sebagai figur panutan “digugu dan ditiru”.

Realitanya, masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan. Ini berarti bahwa guru memiliki kewajiban untuk

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

mencerdaskan masyarakat dan bangsa menuju pembentukan manusia seutuhnya. Karenanya pantaslah Bung Karno menyebut pentingnya guru dalam masa pembangunan adalah sebagai “pengabdian masyarakat”.

3. Tugas Personal

Tugas personal menyangkut pribadi dan kepribadian guru. Itulah sebabnya setiap guru perlu manatap dirinya dan memahami konsep dirinya. Seorang guru harus mampu berkaca pada dirinya sendiri. Bila ia berkaca pada dirinya, ia akan melihat bukan satu pribadi, tetapi ada tiga pribadi, yaitu:

- a) Saya dengan konsep diri saya (self concept)
- b) Saya dengan ide diri saya (self idea)
- c) Saya dengan realita diri saya (self reality)

Jadi tugas guru yang dimaksud adalah tugas yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas, dan dalam bentuk pengabdian. Sehingga keberadaan guru merupakan faktor yang tidak mungkin digantikan oleh komponen mana pun dalam kehidupan bangsa sejak dahulu, karena keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi bagi suatu bangsa yang sedang membangun, terlebih-lebih bagi keberlangsungan hidup bangsa di tengah-tengah lintasan perjalanan zaman dengan teknologi yang semakin canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kepada kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri.

Tanggung jawab guru menurut Asmuni Syakir, yaitu : Guru dikatakan sempurna apabila mempunyai tanggung jawab yang dijalankan dengan baik. Guru adalah seorang pendidik yang juga merupakan pembimbing. Dalam bidang kemanusiaan di sekolah, guru harus bisa menjadi dirinya sebagai orangtua kedua bagi siswa. Seorang guru harus bisa menarik simpati agar menjadi idola para siswa dan disukai sehingga siswa senang belajar dengan guru. Tanggung jawab guru yaitu:

1. Guru bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan kepada diri siswa baik kepribadian, watak serta jasmaniah. Menyalurkan ilmu pada murid

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit. Namun membina murid supaya menjadi manusia berkarakter pasti bukan pekerjaan yang gampang. Mengembangkan watak dan kepribadiannya, sehingga mereka memiliki kebiasaan, sikap, cita-cita, berpikir dan berbuat, berani dan bertanggung jawab, ramah dan mau bekerja sama, bertindak atas dasar nilai-nilai moral yang tinggi, semuanya menjadi tanggung jawab guru.

2. Seorang guru bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada siswa. Bimbingan tersebut supaya siswa bisa mengenal dirinya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, serta mempunyai emosional yang baik.
3. Guru bertanggung jawab untuk melakukan diagnosis dari kesulitan belajar serta melakukan penilaian belajar siswa, melakukan penelitian. Guru sebagai orang yang bergerak dibidang pendidikan harus selalu memperbaiki caranya bekerja.
4. Guru bertanggung jawab untuk masyarakat. Dalam bidang kemasyarakatan, merupakan tugas guru yang tidak kalah pentingnya. Pada bidang ini tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila. Jika dipahami secara mendalam, maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah melainkan juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Salah satu contoh, seorang anak di masa yang akan datang hidup dan bekerja serta mengabdikan diri dalam masyarakat, dengan demikian guru harus melatih dan membiasakan anak agar seorang anak dapat terjun dalam masyarakat. Guru bertanggung jawab untuk ikut menyukseskan pembangunan yang merupakan cara paling tepat untuk membawa masyarakat menjadi kesejahteraan. Pembangunan tersebut adalah pembangunan bidang spiritual dan materiil.
5. Guru mempunyai tanggung jawab moral dimana setiap guru harus mempunyai kemampuan untuk menghayati perilaku serta etika yang sesuai dengan Pancasila sekaligus mengamalkannya. Tanggung jawab guru dalam bidang pendidikan di sekolah adalah harus menguasai cara pengajaran yang efektif dimana guru harus bisa menjadi model bagi murid, bisa memberi nasihat, menguasai teknik bimbingan serta layanan dan bisa membuat serta melaksanakan evaluasi yang lain.

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Pribadi yang baik adalah yang diharapkan ada pada setiap anak didik. Dengan sabar dan bijaksana seorang guru memberikan nasehat mengenai bagaimana cara bertingkah laku yang sopan pada orang lain. Menransfer ilmu pengetahuan kepada anak didik adalah suatu hal yang dinilai mudah, tetapi untuk membentuk jiwa serta sikap perilaku yang baik anak didik merupakan tantangan tersendiri bagi seorang guru. Sebab, anak didik yang dihadapi adalah makhluk yang berakal serta memiliki potensi yang perlu dipengaruhi dengan sejumlah nilai dan norma yang sesuai dengan ideologi dan agama.

Tanggung jawab guru adalah menunjukkan aturan nilai dan norma yang berlaku agar anak didik dapat memahami perbuatan atau tingkah laku mana yang boleh dan tidak untuk dilakukan, perbuatan yang susila dan asusila serta perbuatan yang moral dan amoral. Semua itu harus tercermin dalam tingkah laku seorang guru karena anak didik lebih banyak menilai dari apa yang ditampilkan guru dari pada apa yang guru katakan.

Menurut Peters (1963), ada tiga tugas dan tanggungjawab guru (menggabungkan/menyatu), yakni; (a) guru sebagai pengajar, (b) guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai administrator kelas. Jika ditelisik, ketiga tugas guru yang disampaikan Peters merupakan tugas pokok profesi guru.

Pertama, sebagai pengajar. Guru lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam menjalankan tugas ini guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya.

Guru yang efektif dalam menjalankan perannya sebagai pengajar akan tampak dalam situasi belajar yang diciptakannya (Abdul Yassa, 2013). Situasi belajar yang dimaksud, ditunjukkan dalam banyak hal seperti keluwesan dalam mengajar, adanya empati dan kepekaan terhadap segala kebutuhan siswa, kemampuan mengajar sesuai dengan selera siswa, kemauan memberi penegasan (reinforcement), kemauan memberi kemudahan, kehangatan dan cara mengajar yang tidak kaku, kemampuan menyesuaikan emosi, percaya diri dan ada keriangannya dalam mengajar.

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

Kedua, sebagai pembimbing, guru mesti memberi tekanan kepada tugas, memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Tugas pembimbing, menurut Nana Sudjana (2011), merupakan aspek mendidik, sebab tidak hanya berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, tapi juga menyangkut perkembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa.

Ketiga, sebagai administrator kelas. Tugas ini pada hakikatnya merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Dengan perkembangan sumber informasi dan pelayanan publik yang terus mendapatkan kritik bahkan cemoohan, maka kemampuan dokumentatif dan tertib administrasi benar-benar menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan mesti dimiliki oleh guru.

Dalam perkembangannya, guru juga memiliki tugas dan tanggungjawab yang berlipat. Hal ini, misalnya, dikatakan oleh Amstrong. Dalam pandangan, Amstrong (1981) guru memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengembangkan materi atau kurikulum pembelajaran dan membina dengan baik hubungan dirinya dengan masyarakat luas.

Keempat, sebagai pengembang kurikulum atau materi ajar. Ini bermakna, guru mesti mampu mengadaptasikan materi ajar terhadap realitas sosial dan kemungkinan yang terjadi di masa depan. Dengan begitu materi ajar mesti disampaikan lebih dinamis dan fleksibel, tidak kaku atau a-historis dengan kebutuhan zaman. Sehingga proses pembelajaran pun mestinya semakin efektif dan efisien.

Lebih ril, guru mesti memberikan pemahaman kepada siswanya tentang hal-hal yang menjadi tantangan dan peluang zaman di tengah arus globalisasi yang begitu canggih dan kompetitif. Guru perlu menyadarkan siswanya bahwa mereka bukan saja “manusia” yang layak mendapatkan ijazah, tapi juga yang paling utama mesti bersedia dan siap berkompetensi dengan berbagai “manusia” lintas latar belakang serta berkontribusi positif bagi kepentingan masyarakat luas, bangsa dan negara.

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

Kelima, sebagai penghubung dan perekat sosial. Diakui bahwa guru merupakan bagian dari masyarakat luas yang—dalam strata sosial dan nalar budaya—masuk kategori terhormat dan kerap ditiru. Ini bermakna, guru mesti menjadi pelaku utama dalam mewujudkan integrasi sosial masyarakat yang beragam dalam segala lingkungannya. Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di luar sekolah atau masyarakat luas.

Guru bisa saja dijalani oleh siapapun yang bertugas memelihara, melatih, mengajar, menuntun, membimbing dan memimpin. Dari bermulanya suatu peradaban tidak terlepas dari tangan seorang guru, keberhasilan-keberhasilan selalu dimotori oleh seorang guru. Guru berkewajiban menjalankan tugas sebagai pendidik, yang dalam tugas tersebut guru akan selalu menggali kemampuan untuk bisa mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, ini merupakan kewajiban bagi seorang guru. Penyandang tugas sebagai guru mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan dan pembangun karakter bangsa.

Pada awal perkembangan pendidikan, tugas guru belum mendapat perhatian yang baik, masyarakat banyak yang kurang memandang pentingnya profesi guru. Perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesejahteraan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi guru belum memadai. Hal ini dibuktikan adanya perlakuan-perlakuan diskriminatif profesi guru dibandingkan profesi lainnya. Jika dilakukan kilas balik ke belakang maka bisa dikatakan profesi guru tidak diperhatikan. Berapa banyak guru yang melaksanakan tugasnya tanpa mendapat haknya, berapa banyak guru yang hidup dibawah garis kemiskinan, padahal mereka menghabiskan usia untuk pendidikan.

Dahulu, guru dalam menjalankan tugasnya banyak terbelenggu dengan fenomena sosial, kultural, psikologis, ekonomis, kepegawaian, dll. Tugas yang seharusnya dihargai karena guru yang menjadikan generasi penerus bangsa memiliki tanggung jawab terhadap bangsa. Guru yang mengajarkan budi pekerti, akhlak sehingga banyak lahir pemimpin-pemimpin bangsa dari didikan tangan seorang guru. Tapi bagaimana dengan kesejahteraan guru? jauh dibandingkan dengan profesi lainnya. Guru banyak yang merasa tidak nyaman, aman dalam

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

menjalankan tugasnya. Selalu ada tantangan dalam pengabdian untuk memberikan pendidikan pada anak didik. Inilah potret guru pada awal mula perkembangannya.

Perkembangan teknologi bergulir, perkembangan guru pun semakin pesat. Sehingga guru akhirnya diakui sebagai suatu profesi. Artinya bidang pekerjaan guru harus dilandasi pendidikan, keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu. Sebagai suatu profesi jabatan guru memiliki ciri melibatkan kegiatan intelektual. Profesi guru mulai terangkat harkat dan derajatnya dimulai dengan diundangkannya UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya dibidang perlindungan hukum. Sejak lahirnya UU No. 14 tahun 2005 dan PP. No. 74 tahun 2008, perlindungan guru semakin diperhatikan, perlindungan meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Termasuk juga didalamnya perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual atau Hakl.

Pada posisi demikian, guru mesti menyadari bahwa profesinya merupakan panggilan suci dan aktivitas mulia dan berdampak luas. Dengan begitu, ia mestinya menghargai, menjaga dan meningkatkan kualitas tugas dan tanggungjawab profesinya; di samping berani berkorban dan sungguh-sungguh dalam menjalankannya.

Pendapat lain mengemukakan bahwa ada enam tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya, yakni:

1. Guru bertugas sebagai pengajar.
2. Guru bertugas sebagai pembimbing.
3. Guru bertugas sebagai administrator kelas.
4. Guru bertugas sebagai pengembangan kurikulum.
5. Guru bertugas untuk mengembangkan profesi.
6. Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat.

Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang diajarkannya.

Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan juga menyangkut pembinaan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa.

Guru sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Namun demikian, ketatalaksanaan bidang pengajaran jauh lebih menonjol dan lebih diutamakan pada profesi guru.

Guru sebagai penanggung jawab mengembangkan kurikulum membawa implikasi bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan baru, penyempurnaan praktik pendidikan, khususnya dalam praktik pengajaran. Misalnya, ia tidak puas dengan cara mengajar yang selama ini digunakan, kemudian ia mencoba mencari jalan keluar bagaimana usaha mengatasi kekurangan alat peraga dan buku pelajaran yang diperlukan oleh siswa. Tanggung jawab guru dalam hal ini ialah berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah ada serta mengadakan penyempurnaan praktik pengajaran agar hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Kurikulum sebagai program belajar atau semacam dokumen belajar yang harus diberikan kepada para siswa. Pelaksanaan kurikulum tidak lain adalah pengajaran. Kurikulum adalah rencana atau program, sedangkan pengajaran adalah pelaksanaannya.

Guru sebagai penanggung jawab mengembangkan profesi pada dasarnya ialah tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya. Guru harus sadar bahwa tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain, kecuali oleh dirinya. Demikian pula, ia harus sadar bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu dituntut untuk bersungguh-sungguh, bukan sebagai pekerjaan sampingan. Guru juga harus menyadari bahwa yang dianggap baik dan benar saat ini, belum tentu benar pada masa yang akan datang. Oleh karena itu guru dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas profesinya. Ia harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya dalam bidang

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

pendidikan dan pengajaran, dan masyarakat pada umumnya. Dunia ilmu pengetahuan tak pernah berhenti tapi selalu memunculkan hal-hal baru. Guru harus dapat mengikuti perkembangan tersebut sehingga ia harus lebih dahulu mengetahuinya daripada siswa dan masyarakat pada umumnya. Di sinilah letaknya perkembangan profesi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Guru sebagai penanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat berarti guru harus dapat berperan menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaruan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Untuk itu guru dituntut untuk dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab profesinya, guru harus dapat membina hubungan baik dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Beberapa contoh untuk membina hubungan tersebut ialah mengembangkan kegiatan pengajaran melalui sumber-sumber yang ada pada masyarakat, seperti mengundang tokoh masyarakat yang dianggap berkeahlian memberikan ceramah di hadapan siswa dan guru, membawa siswa untuk mempelajari sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat, guru mengunjungi orang tua siswa untuk memperoleh informasi keadaan para siswanya, dan lain-lain.

Dalam situasi sekarang ini tugas dan tanggung jawab guru dalam pengembangan profesi dan membina hubungan dengan masyarakat tampaknya belum banyak dilakukan oleh guru. Yang paling menonjol hanyalah tugas dan tanggung jawab sebagai pengajar dan sebagai administrator kelas. Demikian pula, tugas dan tanggung jawab sebagai pembimbing masih belum membudaya di kalangan guru. Mereka beranggapan tugas membimbing adalah tugas guru pembimbing atau wali kelas.

Sanksi guru kepada peserta didik terdiri :

- 1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
- 4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah menetapkan prinsip pembelajaran yang digunakan :

- 1) dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu;
- 2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar;

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

- 3) dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;
- 4) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;
- 5) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
- 6) dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
- 7) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;
- 8) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik (hardskills) dan keterampilan mental (softskills);
- 9) pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
- 10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);
- 11) pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di masyarakat;
- 12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas;
- 13) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan
- 14) Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

Pada Bab V tentang pelaksanaan pembelajaran, Alokasi Waktu Jam Tatap Muka Pembelajaran: a. SD/MI : 35 menit, b. SMP/MTs : 40 menit, c. SMA/MA : 45 menit, dan d. SMK/MAK: 45 menit. Untuk pengelolaan kelas dan laboratorium:

- a) Guru wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bersama.

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

- b) Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- c) Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran.
- d) Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik.
- e) Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah dimengerti oleh peserta didik.
- f) Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik.
- g) Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
- h) Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
- i) Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.
- j) Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi.
- k) Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran; dan
- l) Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Sedangkan pada Pelaksanaan pembelajaran, meliputi kegiatan pendahulu-an, inti dan penutup, yaitu :

- a) Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib:

- i. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- ii. memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik;
- iii. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
- iv. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan

menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

b) Kegiatan Inti

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.

i. Sikap

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas tersebut. ii. Pengetahuan

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivitas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning).

iii. Keterampilan

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/ penelitian (discovery/inquiry learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning).

c) Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi :

- i. seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;
- ii. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- iii. melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan
- iv. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

Manajemen PNS

Manajemen PNS sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 55, yang pelaksanaannya menyesuaikan keberadaan PNS, apabila di pusat maka menjadi kewenangan pusat sedangkan PNS daerah menjadi kewenangan daerah, meliputi :

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

- b. pengadaan;
- c. pangkat dan jabatan;
- d. pengembangan karier;
- e. pola karier;
- f. promosi;
- g. mutasi;
- h. penilaian kinerja;
- i. penggajian dan tunjangan;
- j. penghargaan;
- k. disiplin;
- l. pemberhentian;
- m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
- n. perlindungan.

Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memper-timbangkan integritas dan moralitas. Kompetensi meliputi :

- a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
- b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
- c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

Guru merupakan Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Mutasi. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi PNS dalam satu Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. bantuan hukum.

Bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Pemindahan guru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru menyebutkan bahwa Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat baik atas permintaan sendiri maupun kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama. Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus.

Ketentuan Pengangkatan Kepala Sekolah

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).

Syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, yaitu :

- a) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud meliputi :
 - 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - 3) berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;
 - 4) sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - 5) tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6) memiliki sertifikat pendidik;
 - 7) pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;
 - 8) memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

keangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;

- 9) memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- 10) memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah meliputi :

- 1) berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah;
- 2) memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

Sebelum seorang guru diangkat menjadi kepala sekolah, mereka harus melalui tahap persiapan yaitu :

- 1) Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.
- 2) Kepala dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Calon kepala sekolah/madrasah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum dan Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas yang bersangkutan kepada dinas provinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

- 1) Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah.
- 2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan.
- 4) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/ madrasah, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah/madrasah sebagai tugas tambahan.
- 5) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah/madrasah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah/madrasah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.

Kepala Sekolah mempunyai masa tugas yaitu diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun, dan Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja. Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila:

- a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau

b. memiliki prestasi yang istimewa.

Prestasi yang istimewa adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota/ provinsi/nasional. Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan. Mutasi kepala sekolah dan guru

Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:

- a) permohonan sendiri;
- b) masa penugasan berakhir;
- c) telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
- d) diangkat pada jabatan lain;
- e) dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
- f) dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal
- g) berhalangan tetap;
- h) tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
- i) meninggal dunia.

Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah kabupaten, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah/madrasah.

Disiplin ASN/PNS

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memberikan definisi bahwa disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Setiap PNS dilarang :

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

- c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dijatuhi hukuman disiplin, dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin :

- 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a) hukuman disiplin ringan;
 - b) hukuman disiplin sedang; dan
 - c) hukuman disiplin berat.
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c) pembebasan dari jabatan;

- d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Kode Etik Guru

Kode etik profesi sebagai guru di Indonesia. Bahwa setiap profesi yang dikerjakan atau dilakukan oleh seseorang sudah pasti memiliki peraturan serta memiliki etika-etika tertentu. Begitu juga orang yang berprofesi sebagai seorang guru. Di masyarakat orang yang berprofesi sebagai guru sangat dihormati, disegani, bahkan ketika mereka telah tiada mereka akan selalu dikenang nama dan jasa-jasanya.

Namun sering kita melihat berita tentang penyimpangan-penyimpangan moral yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku berprofesi sebagai guru. Motifnya bermacam-macam sehingga mereka melakukan perbuatan tersebut. Kadang juga mereka tidak mengetahui bahwa berprofesi sebagai seorang guru ada kode etik yang harus dijadikan pedoman dan diaplikasikan dalam dirinya.

Kode etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

Kode etik juga didefinisikan sebagai pola aturan, pedoman etis, tanda, tata cara dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Sedangkan kode etik menurut KBBI yaitu norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Dari Penjelasan KBBI tentang "kode etik" dan "guru" tersebut dapat kita simpulkan Kode etik guru yaitu Norma dan asas sebagai landasan tingkah laku dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini wajib untuk ditaati bagi setiap guru dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehari hari.

Sesuai Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013 Tentang Kode Etik Guru Indonesia, menyebutkan sebagai berikut :

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

Kewajiban Umum

- 1) Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah/ janji guru.
- 2) Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 3) Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik.
- 4) Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik.
- 5) Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- 6) Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif.
- 7) Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik.
- 8) Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.
- 9) Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.
- 10) Menghormati hak orang tua/wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik.
- 11) Membina hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan.
- 12) Menjaga hubungan profesional dengan orang tua/wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Kewajiban Guru terhadap Masyarakat

- 1) Menjalani komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
- 2) Mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.
- 3) Bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku.
- 4) Bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif.
- 5) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat, serta menjadi panutan bagi masyarakat.

Kewajiban Guru terhadap Teman Sejawat

- 1) Membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antarteman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan.
- 2) Saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan pengalaman, serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru.
- 3) Menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat.
- 4) Menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antarteman sejawat.

Kewajiban Guru terhadap Profesi

- 1) Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi.
 - 2) Mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
 - 3) Melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi.
 - 4) Dalam melaksanakan tugas tidak menerima janji dan pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tugas keprofesi
 - 5) Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pendidikan. Kewajiban Guru terhadap Organisasi Profesi
- 1) Menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi.

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

- 2) Mengembangkan dan memajukan organisasi profesi.
- 3) Mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalitas guru dan pusat informasi tentang pengembangan pendidikan.
- 4) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi profesi.
- 5) Melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi.
- 6) Berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 7) Berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan.
- 8) Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

B. SUMBER HUKUM PENDIDIKAN DAN ANAK

Berikut adalah sumber hukum pendidikan dan terkait anak yang berlaku di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan

- Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 19. Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : VI /KONGRES/XXI/PGRI/2013 Tentang Kode Etik Guru Indonesia;

C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU

Perlindungan hukum adalah upaya melakukan perlindungan kepada guru dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlindungan hukum atau perlindungan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Perlindungan profesi adalah upaya memberi perlindungan yang mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/ pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kepada guru mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/ atau resiko lain. Perlindungan HaKI adalah pengakuan atas kekayaan intelektual sebagai karya atau prestasi yang dicapai oleh guru dengan cara melegitimasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya guru mendapat

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

perlindungan. Tujuannya agar guru tenang dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik. Selengkapnya pada pasal 39 menyebutkan perlunya “perlindungan guru” yaitu :

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Selanjutnya, naskah akademik ini fokus pada pembahasan Perlindungan Guru atas Hukum atau Perlindungan Hukum Guru. Sampai sejauh ini memang belum ada evaluasi yang menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tetapi secara umum, memang perlindungan bagi guru dinilai masih rendah. Ada guru yang dipidanakan gara-gara memberikan sanksi yang dinilai berlebihan kepada peserta didik. Ada guru yang diteror, terancam karir dan keselamatan jiwanya karena mengadakan penyimpangan Ujian Nasional dan penyimpangan dana BOS. Ada guru yang belum tersentuh pengembangan profesi (diklat). Bahkan selama sekian lama bertugas sampai pensiun belum pernah sekalipun didiklat. Dan masih banyak banyak lagi masalah lainnya.

Selanjutnya ada norma, yang oleh beberapa ahli memberikan definisi seperti; Isworo Hadi Wiyono menyatakan norma adalah peraturan atau petunjuk hidup yang memberi ancar-ancar perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perubahan mana yang harus dihindari. Salah satunya adalah norma sosial. Ciri-Ciri Norma Sosial pada umumnya tidak tertulis. Dalam masyarakat, norma sosial tidak tertulis yang hanya diingat dan diserap serta mempraktekkannya dalam interaksi antara anggota kelompok masyarakat. Hasil kesepakatan bersama, sebagai peraturan sosial yang difungsikan untuk mengarahkan perilaku seluruh anggota masyarakat.

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

Norma sosial dibentuk dan disepakati bersama seluruh warga masyarakat. Mengalami perubahan, sebagai aturan yang lahir dari proses interaksi sosial di masyarakat, norma mengalami perubahan sesuai keinginan dan kebutuhan dari anggota masyarakat itu sendiri. Ditaati bersama, norma sosial merupakan seperangkat aturan sosial untuk mengarahkan dan menertibkan perilaku anggota masyarakat dari keinginan bersama. Oleh sebab itu, norma didukung dan ditaati bersama. Pelanggar norma mendapatkan sanksi, norma sosial bersifat memaksa individu agar berperilaku sesuai dengan kehendak bersama. Sehingga pelanggaran diberikan sanksi dengan tindakan atau daya ikat norma. Selanjutnya norma sosial terhadap guru yang berlaku di Kabupaten Luwu Utara sebagai :

1. Guru adalah panutan, mempunyai wawasan luas termasuk ilmu agama;
2. Guru mendapat kedudukan terhormat di tengah masyarakat.

Namun seiring perkembangan, norma sosial tersebut mengalami perubahan, dari waktu ke waktu semakin menipis, cara pandang masyarakat terhadap guru sudah sama dengan profesi lain, bergeser kepada kepribadian yang menyandang profesi itu.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan tetap memberikan ruang pengaturan beberapa bidang yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dalam Pasal 154 berbunyi “DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang : a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;”. Di antara bidang itu adalah bidang Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Dalam pasal 10, Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan masih bermakna luas atau umum sehingga sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang itu dituangkan dalam beberapa Peraturan Pemerintah, salah satu maknanya adalah perlindungan terhadap stake holder pendidikan, dan yang paling punya peranan penting adalah guru sebagai tenaga fungsional tertentu.

Masih undang-undang yang sama, pemerintah wajib memberikan jaminan terselenggaranya pendidikan. Pasal 11 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Agar penyelenggaraan pendidikan bermutu, maka penyelenggara harus jelas hak dan kewajibannya. Penyelenggara adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pada pasal 40 menyebutkan pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

1. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
2. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

3. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
4. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
5. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Pasal 3 menyebutkan bahwa “ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut : (huruf f) jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Pada pasal 21 menyebutkan hak PNS secara umum bahwa “PNS berhak memperoleh : (poin c) perlindungan” dan pada Pasal 55, “Manajemen PNS meliputi : poin n. Perlindungan”.

Salah satu hak tenaga pendidik dan kependidikan adalah perlindungan hukum. Ada beberapa aturan yang memberikan payung untuk perlindungan guru, namun kesemuanya masih bersifat umum, belum diatur secara khusus dan atau terinci, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah. Di antara kebijakan pemerintah itu adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Pasal 7 ayat 1 : “Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: poin h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Pasal 14 ayat 1 : “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak : (poin c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (poin g) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Pada pasal 39 lebih khusus lagi menyebutkan perlunya “perlindungan guru” yaitu :

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

- 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- 4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/ pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- 5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Perlindungan guru bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tetapi juga menjadi kewajiban organisasi profesi guru :

Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan “Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.”

Lebih tegas dan lebih jelas mengenai perlindungan guru, termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); mengatakan bahwa guru mempunyai tugas dan tanggung jawab dilihat dari definisinya pada Pasal 1 menyebutkan “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Tugas dan tanggung jawab itulah yang perlu dilindungi sebagaimana Pasal 40 kembali menegaskan keterkaitan, sejalan dan saling memperkuat dengan undang-undang lain. Ayat 1 menyebutkan Guru berhak mendapat perlindungan

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pihak yang memberikan perlindungan adalah stake holder yang terdiri dari Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah Daerah berarti pemerintah Kabupaten Luwu Utara bersama Satuan Kerja Terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional, satuan pendidikan yang dimaksud adalah Unit Pelaksana Teknis di Kecamatan dan sekolah-sekolah, organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru. Sedangkan masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Perlindungan guru untuk memberikan rasa aman dan jaminan keselamatan bisa kita lihat pada ayat 2 bahwa Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:

1. hukum;
2. profesi; dan
3. keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Hak atas Kekayaan intelektual

Adapun hubungan stake holder dalam memberikan perlindungan adalah untuk saling membantu sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 bahwa "Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Lebih rinci bentuk perlindungan hukum bisa didapatkan dalam Pasal 41 ayat 1: Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari, :tindak kekerasan, ancaman, perlakuan, diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil. dari pihak, peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

Dengan banyaknya aturan yang mencatumkan perlindungan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkhusus perlindungan guru, dengan bahasa yang sangat eksplisit, tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah lainnya bahkan saling menguatkan maka sudah seharusnya bagi Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan Peraturan Daerah Perlindungan Guru.

Terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar yang menjadi tugas dan tanggung jawab guru merupakan hal yang perlu dicermati, menjadi poin-poin penting dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah ini. Karena terjadinya kriminalisasi siswa dan atau orang tua terhadap guru atau sebaliknya, diawali pada praktek proses belajar mengajar dan pada penegakan disiplin anak didik. Maka kita perlu melihat bagaimana proses belajar mengajar itu dan sejauh mana kewenangan pendidik dalam penegakan disiplin.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), Pasal 14 ayat 1 (poin f) dikatakan bawah “dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); pasal 37 berbunyi :

- 1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
- 4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada peraturan ini disebutkan kapan seorang guru memberikan sanksi dan pada pelanggaran apa seorang anak didik bisa di sanksi. Norma agama, norma susila, norma kesopanan adalah bentuk peraturan yang hampir tidak pernah tertulis di seluruh lapisan masyarakat karena norma itu sudah menjadi kebiasaan, diamalkan, dan jika dilanggar akan dikucilkan. Namun seiring perkembangan, norma-norma itu juga mengalami “pengikisan” sehingga kita mendapatkan betapa banyaknya kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Ada sekitar 70% pecandu narkoba adalah kalangan remaja dan dekadensi moral bukan sebuah pemandangan yang asing lagi saat ini kita saksikan. Oleh karena itu, norma agama, norma susila dan norma kesopanan perlu dijadikan inspirasi dan dituangkan dalam bentuk tertulis agar ukuran jenis pelanggaran dan sanksinya juga jelas. Dalam ketentuan hukum kita di Indonesia, yang menjadi acuan adalah hukum positif. Norma-norma nyaris tidak dijadikan sebagai rujukan dalam pemutusan perkara bahkan tidak sama sekali. Norma itu hanya berlaku pada masyarakat namun tidak pada lembaga peradilan.

Masih pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, ayat 2 menyebutkan bentuk sanksinya. berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik. Pada ayat ini tidak disebutkan hukuman dalam bentuk fisik, namun ada kalimat “hukuman yang bersifat mendidik” sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan. Perlu ditinjau lebih jauh kata “Kaidah pendidikan”, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Hukuman yang bersifat mendidik perlu didefinisikan dan disertai contoh kongkrit agar tidak menimbulkan multi tafsir. Hal ini melihat kondisi geografis dan demografi Kabupaten Luwu Utara . Luwu Utara terdiri dari ratusan pulau, beberapa bahasa daerah, masyarakat pedalaman dan di pesisir, terdiri dari

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

beberapa suku, norma sosial dan norma kesopanan yang berbeda pula. Artinya ada budaya yang berbeda pula dan karena perbedaan itu menyebabkan cara mendidik yang turun temurun berbeda. Kaidah pendidikan sesuai prinsip penyelenggaraan pendidikan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut :

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pada poin satu di atas disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal ini perlu kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kekerasan anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dalam undang-undang itu tidak disebutkan definisi, ukuran, ataupun ciri kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikis. Dengan penyebutan kata “berakibat timbulnya” maka bisa dimaknai bahwa “ada kekerasan yang tidak memberi akibat timbulnya”. Oleh sebab itu perlu dibuatkan definisi, ukuran atau ciri kekerasan yang bisa berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan,

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

khususnya fisik. Sedangkan psikis yang tidak berwujud, perlu juga diukur tapi dengan cara yang berbeda dengan fisik. Hal ini mungkin agak sulit akan tetapi sangat dibutuhkan untuk menghindari “kebohongan” pada pelaku. Sebagai contoh, anak yang melakukan tindakan kurang ajar terhadap guru, lalu oleh guru memberi peringatan lisan dengan tegas. Kemudian ketegasan guru tersebut dimaknai sebagai kekerasan yang menimbulkan penderitaan psikis. kemudian anak jarang ke sekolah, padahal bisa saja anak itu memang malas dan peristiwa “ketegasan” itu hanya sebagai momentum waktu saja untuk mewujudkan kemalasannya ke sekolah.

Dikatakan pula bahwa pendidikan diselenggarakan atas dasar nilai keagamaan. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama. Memperhatikan visi misi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara periode 2016-2021 yang berbunyi “Mewujudkan Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis pada Nilai-Nilai Kultural dan Keagamaan”, kemudian pada misi kami melihat point 1) 1. Mewujudkan nilai agama dan spiritualitas sebagai sumber inspirasi dan basis nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, poin 3) Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, poin 4) Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta di sektor perikanan, kelautan dan pariwisata. Ini bermakna bahwa nilai dan norma agama dalam hal ini islam sebagai agama mayoritas menjadi rujukan dalam menetapkan aturan di Kabupaten Luwu Utara . Sumber hukum islam adalah Al Quran dan Hadits. Dalam mendidik anak, ada beberapa dalil yang perlu dijadikan acuan pendidikan kita. Dalam mendidik mengutamakan berlemah lembut, Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda :

Telah diriwayatkan pula bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya sama sekali, tidak kepada istri beliau ataupun pembantu beliau. Beliau hanya memukul ketika berperang dijalan Allah. (HR. Muslim 2328)

Maka kita sebaiknya menggunakan kata-kata nasehat jika ingin memperbaiki perilaku anak atau dengan menggunakan dorongan dan motivasi. Bila kata-kata yang baik tidak berpengaruh maka kita gunakan kata-kata yang

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

berisi teguran dan ancaman sesuai dengan kesalahan anak. Bila juga tidak bermanfaat maka saatnya memukul. Kondisi tabiat anak berbeda-beda. Diantara mereka ada yang cukup dengan isyarat mata untuk menghukum dan menegurnya. Isyarat mata ini memberikan pengaruh yang kuat pada dirinya dan menjadi sebab berhenti dari kesalahan yang ia lakukan. Namun ada pula di antara mereka tidak akan sadar kecuali harus dengan pukulan dan perlakuan keras. Maka untuk anak tipe seperti inilah kita lakukan pemukulan dan berlaku keras. Akan tetapi sesuai dengan kebutuhan saja serta tidak menjadikannya kebiasaan. Seperti halnya seorang dokter yang memberi suntikan kepada pasiennya walaupun suntikan itu menyakitkan akan tetapi suntikan itu sebatas kadar penyakitnya saja.

Begitu juga sikap tegas Abu Bakar Ash Shidiq kepada 'Aisyah radhiallahu'anhu. Abu Bakar memukul putrinya karena menyebabkan pasukan Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam tertunda keberangkatannya dan karenanya sahabat lain mengeluh. Dan kisah lainnya sangatlah banyak sekali untuk disebutkan.

Dalam melaksanakan hukuman pukul, tidak dibolehkan memukul wajah, karena Rasulullah SAW melarangnya. Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang diantara kalian memukul saudaranya maka hendaknya dia menghindari memukul wajah." (HR. Muslim 2616 dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu secara marfu').

Dalam menjalankan profesi sebagai guru, mereka juga harus memenuhi kode etik guru berupa kewajiban terhadap peserta didik :

- 1) Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik.
- 2) Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik.
- 3) Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- 4) Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif.

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

- 5) Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik.
- 6) Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.
- 7) Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.

Pada tahun 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dalam pertimbangannya, disebutkan “bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik” dan “bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan”. Pertimbangan tersebut “mengakui” bahwa di lingkungan sekolah saat ini sudah rawan dan kerap kali terjadi kriminal. Namun dalam Permendagri itu lebih mengarah pada upaya melindungi anak, sebagaimana tujuannya dalam pasal 3 :

- a. melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan;
- b. mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; dan
- c. mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

Pada bab IV tentang pencegahan, pasal 7 disebutkan “Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.” Dan pada ayat 4 berbunyi “Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi : a. penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan”. Ayat dan poin ini semakin membuka ruang bahwa Pemerintah Daerah sangat perlu untuk membuat kebijakan yang melindungi guru dan anak didik.

Permendikbud di atas adalah salah satu implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Dengan demikian, kehadiran Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Guru nantinya dilihat dari hirarki hukum adalah turunan dari Undang-Undang Kepegawaian, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah tentang Guru serta salah satu “jawaban” atas masalah-masalah yang telah banyak diurai pada bab sebelumnya sebagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan permen terkait pengaturan dan pencegahan tindak kekerasan di sekolah. Tidak ada tumpang tindih antar produk hukum tersebut. Menjaga hak guru dan hak anak adalah kewajiban pemerintah, semuanya diatur dalam undang-undang, tidak ada yang dominan bahwa anak didik diutamakan dari guru atau sebaliknya guru diutamakan dari anak didik, tidak ada yang absolut (mutlak) tetapi prinsip keadilanlah yang perlu ditegakkan dalam hukum.

Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Guru ini secara umum akan menciptakan iklim yang humanis, salah satunya mempertegas benang merah hak dan kewajiban guru dan anak didik, mekanisme pengawasan, perlindungan, pihak-pihak yang dilibatkan. Jika terjadi masalah ada mekanisme yang jelas untuk ditempuh, siapa saja yang dilibatkan. Jika memang harus diterapkan sanksi ada ukurannya dan bagaimana efeknya ke depan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Masyarakat Luwu Utara dikenal sebagai masyarakat yang agamis dan humanis. Maka sangat wajar ketika ada event akbar bernuansa religius kerap kali diselenggarakan. Humanis karena mereka saling kenal mengenal dari ujung utara ke ujung selatan. Apalagi jika mereka bertemu diperantauan, mereka akan seperti saudara meski tak pernah bertemu sebelumnya. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah selalu mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan karena pada dasarnya semua merasa bersaudara.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai falsafah Bangsa Indonesia dalam salah satu silanya berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang memiliki beberapa butir menyebutkan :

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

Bahwa perbedaan/kebhinnekaan adalah takdir bangsa ini namun perbedaan bukanlah sebab berpecah belah melainkan untuk saling mengenal, saling memahami dan saling membantu serta mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum.

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

Pada sila kelima Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan 1) Sebagai warga Negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

Semua warga negara Indonesia wajib dilindungi dalam upaya memanusiakan manusia secara adil dan beradab.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempengaruhi pola pikir, sikap, kesejahteraan, dan kebutuhan yang berbeda antara masa kini dengan masa sepuluh apalagi dua puluh tahun yang lalu. Begitu juga dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat terutama norma sosial sangat terasa perbedaannya.

Masyarakat Masamba paling tidak terdiri dari 2 kelompok berdasarkan usia mereka. Kelompok pertama adalah masyarakat yang merasakan orde lama, orde baru dan orde reformasi, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang murni lahir di era reformasi. Perbedaan era itu, menyebabkan pola pikir berbeda. Kelompok pertama kenyang dengan pengalaman hidup dan memungkinkan mereka bisa bersikap bijak sedangkan kelompok kedua semenjak lahir dan dibesarkan dengan teknologi, permainan mereka serba software dan dalam mencapai cita-cita maupun menyelesaikan masalah kehidupan serba praktis.

Perbedaan sebagaimana pada paragraf di atas telah menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dunia pendidikan. Guru dan anak didik adalah pemerannya, merekalah yang paling sering beriteraksi selain orang tua di rumah. Masalah kerap kali terjadi sebagaimana telah disebutkan dalam Bab pendahuluan, sub bab latar belakang. Beberapa di antaranya berakhir dengan vonis penjara terhadap guru. Hal ini meresahkan bagi semua kalangan. Kearifan lokal berupa penyelesaian masalah secara kekeluargaan sekaligus

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

pengamalan nilai-nilai pancasila jangan sampai tanpa makna apa-apa di masyarakat. Seharusnya diimplementasikan dalam sikap, tutur kata, dan pengambilan keputusan. Jika ini dibiarkan akan menjadi bom waktu yang tanpa disadari telah menjadi masalah kritis negara. Maka sebelum menjadi masalah besar, langkah-langkah pencegahan dan payung hukum perlu disiapkan untuk dijadikan instrumen dalam penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah.

Pembangunan manusia membutuhkan waktu jangka panjang. Masalah berawal dari pendidik dan sebaliknya maka keduanya perlu diatur, diberikan batasan yang jelas, mekanisme yang jelas, hak dan kewajiban yang dipertegas serta penegakan aturan itu sendiri. Pendidik masa kini adalah anak didik produk masa lalu, dan anak didik saat ini akan menjadi produk masa yang akan datang. Setiap tahun kasus kriminalisasi selalu muncul dan bertambah, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

C. LANDASAN YURIDIS

Pada III telah dikemukakan beberapa dasar hukum tentang perlindungan Pegawai Negeri Sipil pada Undang-Undang Kepegawaian dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), kemudian pada Undang-Undang Guru dan Dosen, lalu dipertegas pada Peraturan. Pemerintah tentang Guru. Namun perlindungan itu sifatnya masih umum, belum secara teknis. Hal ini membuka ruang untuk membuat Peraturan Daerah terkait perlindungan guru.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru di Masamba belum ada sama sekali. Kabupaten Luwu Utara saat ini memiliki aturan terkait pendidikan baru 3 produk yakni Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan, Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendidikan Gratis dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan.

Jadi dengan adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru akan mengisi kekosongan produk hukum di Luwu Utara dan menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat khususnya warga sekolah.

BAB V**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH**

Naskah Akademik (NA) ini disusun sebagai dasar berpikir agar terwujud Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru, yang sasarannya adalah :

1. peserta didik;
2. pendidik;
3. tenaga kependidikan;
4. orang tua/wali;
5. komite sekolah;
6. masyarakat;
7. pemerintah daerah; dan
8. Pemerintah.

Perlindungan Guru dimaksudkan agar :

- a. terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- b. terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan; dan
- c. menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.

Perlindungan Guru bertujuan untuk :

- a. Perlindungan Guru di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan Perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui perlindungan hukum;
- b. melindungi dan mencegah guru dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan;

- c. mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Adapun ruang lingkupnya sebagai berikut :

A. KETENTUAN UMUM

Memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa sehingga menghindari perbedaan penafsiran.

1. MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Materi muatan dalam Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Guru berisi aturan atau norma, baik norma kewenangan maupun norma perilaku. Norma kewenangan merupakan aturan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melakukan perlindungan terhadap guru yang menjadi domain kebijakannya dan untuk memberikan persetujuan terhadap perihal perlindungan guru. Sedangkan norma perilaku merupakan aturan yang berisi perintah, larangan dalam kaitannya dengan perlindungan guru. Dalam ruang lingkup ini juga dimuat maksud, tujuan dan sasaran. Kemudian memuat upaya pencegahan, di antaranya ada perjanjian sekolah dengan anak didik, orang tua anak didik yang diketahui Komite Sekolah yang sifatnya mengikat. Selanjutnya penanggulangan, bahwa setiap persoalan yang menyentuh aspek hukum antara guru, anak didik dan atau orang tua anak didik diselesaikan dengan berpedoman pada perjanjian yang sebelumnya telah diikat, tidak langsung mempidanakan akan tetapi melalui wadah yang telah disepakati bersama. Jika terjadi tindak kekerasan yang harus berlanjut kepada pihak berwajib, Pemerintah Daerah Wajib mengadvokasi guru sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Dalam hal pendampingan/pembelaan ini, organisasi profesi guru bisa melibatkan dan atau dilibatkan.

2. KETENTUAN SANKSI

Peraturan Daerah tentang perlindungan guru akan memuat sanksi terhadap guru dan peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi/hukuman terhadap guru mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan untuk peserta didik, mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

3. KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan ini merupakan materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru adalah sesuatu yang mendesak dan menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bersama segenap unsur pendidikan lainnya (Sekolah, organisasi profesi, orang tua anak didik, pemerhati pendidikan). Hal ini disebabkan jumlah kasus kriminalisasi guru menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Melindungi anak adalah kewajiban pemerintah karena mereka memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi. Perlindungan guru dan perlindungan anak masing-masing memiliki payung hukum undang-undang, agar tidak dibenturkan dan saling menyandera, perlu di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara . Diharapkan pula ruang lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini akan memunculkan kesadaran segenap insan pendidikan bahwa guru adalah pahlawan pembangun insan cendekia yang berhak mendapatkan perlindungan.
2. Terkait dengan perlindungan terhadap guru, diperlukan penegasan kembali spirit perlindungan guru yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru.
3. Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing,"Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi keselamatan dan kesehatan, serta perlindungan hak dan kekayaan intelektual

B. SARAN

1. Agar proses pendidikan menjadi baik dan guru menjalankan tugasnya dengan profesional maka diperlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat demi mewujudkan guru yang mempunyai

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

martabat dan terlindungi oleh hukum dalam menjalankan profesinya agar tercipta pencapaian kualitas yang maksimal, hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang sistim Pendidikan Nasional. Maka pada setiap daerah harus ada regulasi yang mengatur tentang itu, salah satunya dengan membuat Peraturan Daerah tentang perlindungan guru yang substansinya adalah agar guru dalam menjalankan profesinya terlindungi dengan kekuatan hukum dan harus ada pemahaman yang utuh bahwa dalam menjalani proses pendidikan. Guru diberi hak otoritas dalam mendidik peserta didik, jika perlu ada fit and proper test untuk menjadi seorang guru, agar dunia pendidikan tidak lagi disibukan dengan ulah guru yang tidak mengerti esensi dalam mendidik.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan guru ini diharapkan bisa menjadi prioritas Program Legislasi Daerah.
3. Agar pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu masukan-masukan yang mendukung dan menyempurnakan naskah akademik lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduhzen, Mohammad. 2008. *Makna Profesionalitas yang Melekat pada Guru. Makalah pada Seminar Sehari Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Profesinya* Indralaya Ogan Ilir.
- Ahmadi, Fatah. 2012. *Makalah Peran dan Fungsi Guru*, (online), (<http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/27/>, diakses 27 April 2012)
- Eureka Pendidikan. 2015. Definisi Murid, Siswa dan Peserta Didik.
- Idris, Muhamad. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019*, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015
- Mulyasa. E. *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Cet. VII; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008
- Nata, Abuddin. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jilid I. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nuridin, Muhammmad. 2010. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: AR. Ruzz Media Group
- Ratnasari, Amelia. 2012. *Makalah Guru Profesional*, (online), (<http://amalia-ratnasari.blogspot.com/2012/06/makalah-guru-profesional.html#ixzz2MsiGLk1L>, diakses Juni 2012)
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Naskah Akademik Perlindungan Guru Kabupaten Luwu Utara

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586). Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Sekretariat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : VI /KONGRES/XXI/PGRI/2013 Tentang Kode Etik Guru Indonesia. Pengurus Besar PGRI. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Sekretariat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Rudy. 2008. Memperkuat Peran Organisasi Profesi dalam Perlindungan Hukum Bagi Guru